



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **161** TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

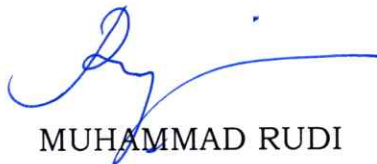
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1501

RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Renja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 merupakan dokumen sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Renja juga menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagai penjabaran dari visi, dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam kegiatan juga memuat tentang indikator-indikator kinerja kegiatan berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran.

Sehingga dengan dokumen rencana kinerja juga merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategi yang telah ditetapkan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan system penganggarnya.

Pada Rancangan Akhir Perubahan Renja tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam merencanakan 6 (enam) program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran **Rp. 100.547.526.487.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 12
2.1. Evaluasi terhadap Renja Perangkat daerah Triwulan II Tahun 2024	 12
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 39
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	 39
3.2. Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 ..	40
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
 BAB IV PENUTUP	 65

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024	13
TABEL 2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	34
TABEL 3.1	PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN	42
TABEL 3.2	PENETAPAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024	56

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH	3
GAMBAR 1.2	KETERKAITAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA	4
GAMBAR 1.3	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renja 2024 Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musrenbang. Rancir Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah dan pembangunan Daerah pada umumnya. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Renja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2024 disusun dengan skala prioritas pembangunan, dengan mempertimbangkan keuangan daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan maka proses penyusunan Rancangan awal renja Perangkat Daerah tahun 2024 dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan rencana kerja pemerintah daerah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
4. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan setiap Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Adanya keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Renstra PD dan mengacu pada rancangan akhir RKPD Kota Batam sebagai tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesbangpol juga mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara RPJMD Kota Batam dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Visi Kota Batam tahun 2021-2026 “**Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera**”.

2. Misi Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diverifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.
- b. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transpotrasi yang maju,ramah,aman,asri dan nyaman sesuai tata ruang;
- c. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia;
- d. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
- e. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, responsive, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

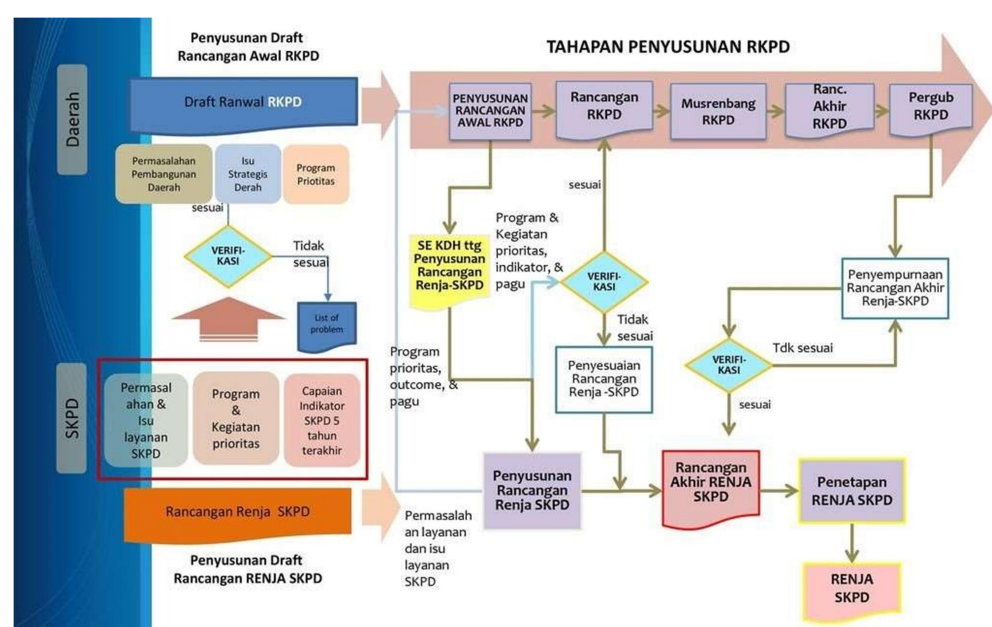
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang politik;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan

g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

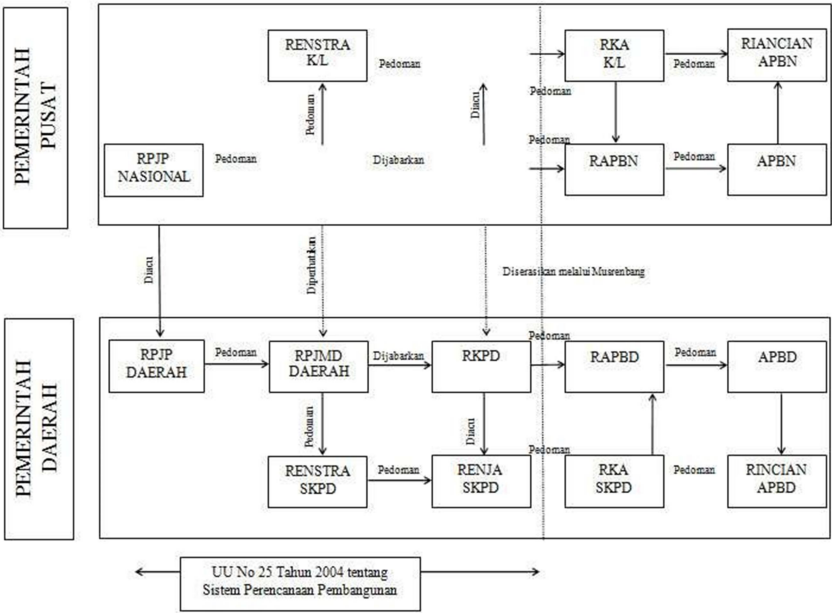
Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

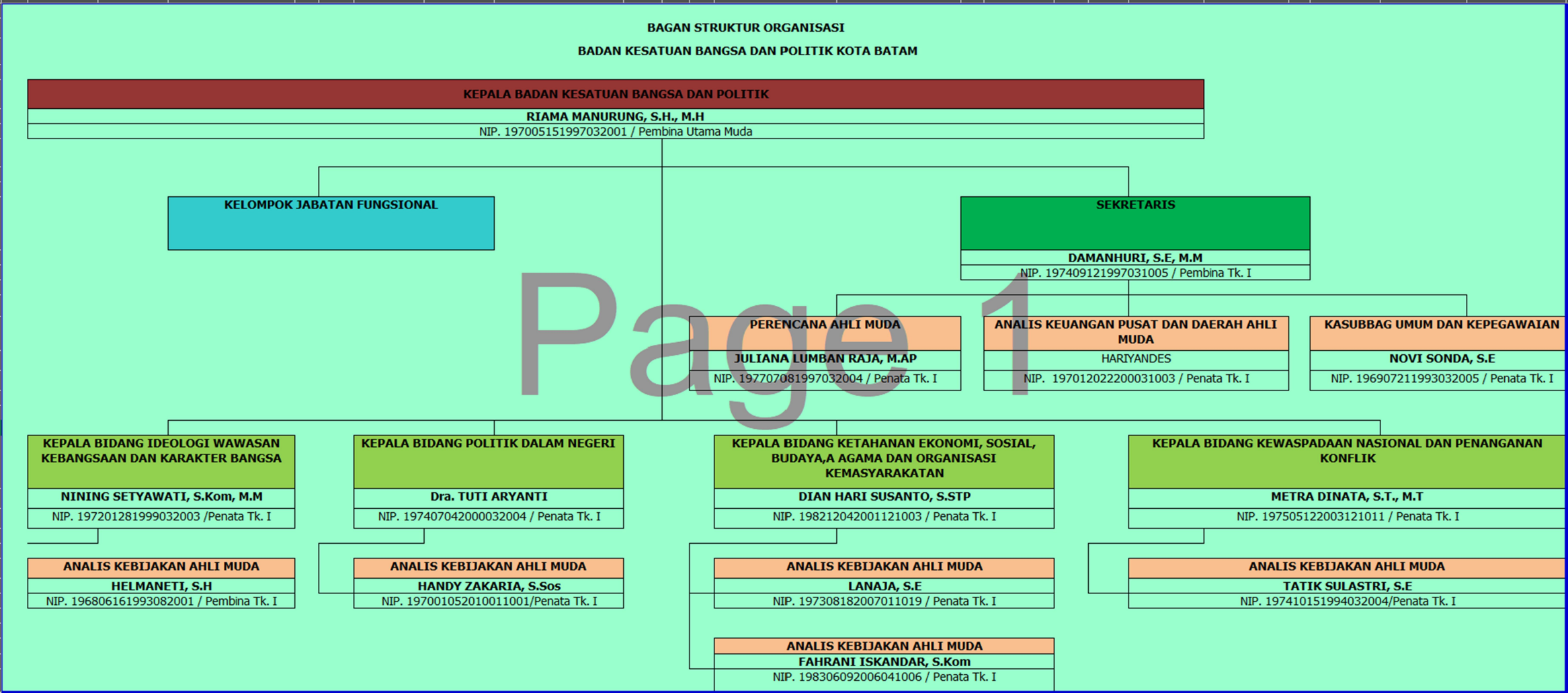
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;

- d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang politik;
- e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
sebagai berikut :



Gambar 1.3
Bagan Struktur Organisasi

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2).
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54).
 13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2).
 14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127).
 15. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 863);
 16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 935);

17. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1149);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 208 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam 2021-2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1076);
19. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1423);

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 adalah melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensidan keterpaduaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, memasuki semester II Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan usulan kegiatan dari instansi vertikal, dan untuk mencapai target kinerja sehingga perlu melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) 2024.

Dalam penyusunan Ranhir Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 mengikuti tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kota Batam 2024 dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusun Rambahir Perubahan Renja Tahun 2024 ini dengan maksud untuk menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Melaksanakan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Mengakomodir usulan kegiatan dari instansi vertikal dan memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024;
5. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam Tahun 2024 sesuai dengan RKPD Kota Batam.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2. 1 Evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

**BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

- 3. 1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.2 Perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahunh 2024
- 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Tercapainya tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sub kegiatan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program/kegiatan.

Capaian pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam sampai dengan triwulan II pada tahun 2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum bahwa capaian kinerja sampai triwulan II belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari total anggaran yang dianggarkan **Rp 87.997.855.230** dipergunakan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Kinerja serapan anggaran yang telah direalisasikan hingga triwulan II sebesar **Rp 50.019.134.296** Secara pencapaian target dan presentasi realisasi anggaran untuk laporan keuangan sampai triwulan II yaitu sebesar 56.84% fisik yaitu : 62.14%. Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan TW II tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingk at Realis asi (%)		Realis asi	Tingk at Realis asi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM											
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahandaerah	100%	100%	100%	100%	100 %	57%	57%	100 %	57%	57%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%	100%	57%	57%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang/ bulan	35 orang/ bulan	35 orang/ bulan	100%	39 orang/bulan	39 orang/ bulan	100%	39 orang/bulan	39 orang/bulan	82.97%
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	-	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targe t (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisas iTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%	100%	57%	57%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	4 Paket	100 %	5 Paket	3 Paket	60%	5 Paket	3 Paket	60%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediaka	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	1 Paket	50%	2 Paket	1 Paket	50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	-	-	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD)tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd TW II tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisa sitarget renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat dan koordinasidan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	6 laporan	50%	12 laporan	6 laporan	50%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapnagan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	1 Unit	-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebelyang disediakan	16 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	16 Unit	-	-	16 Unit	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan MesinLainnya yang disediakan	20 Unit	22 Unit	22 Unit	100%	21 Unit	-	-	20 Unit	-	-
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	100%	50%	50%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd TW II tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian programdan Kegiatans/d Tahun Berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	85%	85%	100%	34%	34%	100%	34%	34%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	50%	1 Unit	50%	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	5 Unit	5 Unit	4 Unit	60 %	5 Unit	3 Unit	50%	5 Unit	50%	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	47 unit	35 unit	75 %	54 unit	-	-	54 unit	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan Program dan Sub Kegiatan sd TW II tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ""yang dilaksanakan""	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya	100%	100%	100%	100%	100%	82%	82%	100%	82%	82%
6.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	15%	15%	100%	15%	15%
		Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang				40 Orang	0	50%	40 Orang	40 Orang	17%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegia tan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatansd Mei tahun 2024		Target Progra m/ Kegiata n s/d tahun berjala n (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d TahunBerjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	180 keluarga	150 keluarga	150 keluarga	100 %	160 Keluarga	160 Keluarga	100%	160 Keluarga	160 Keluarga	88.89%
	Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta Kegiatan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan yang diKoordinasikan	680 Orang	665 orang	618 orang	93 %	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	300 Orang	44.11%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	30%	30%
		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	30%	30%
		Persentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Persentase Peserta/Unit yang mengikuti monev dan Menindaklanjuti Hasilnya	80%	80%	80%	100%	85%	80%	80%	85%	80%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	100%	30%	30%	100%	30%	30%
		Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan dan Etika Serta Budaya Politik yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targ et (202 3)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisas i	Tingkat Realisasi (%)		Realisas i capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	100%	100 %	100%	100%	100%	30%	30%	100%	30%	30%
		Persentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100 %	100%	100%	100%	-	-	100%	-	-
		Persentase Peserta/Unit yang mengikuti monev dan Menindaklanjuti Hasilnya	80%	80 %	80%	100%	85%	80%	80%	85%	80%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Target (2023)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan.	30 Orang	204 orang	204 orang	100%	235 Orang	-	-	235 Orang	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program / Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisa si (2023)	Tingka t Realisa si (%)		Realisa si	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisas iTarget Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 Laporan	30 laporan	30 laporan	100 %	37 Laporan	35 Laporan	94%	37 Laporan	35 Laporan	59 %
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksa nakan	1 Kebijakan	1 Kebija kan	1 Kebij akan	100%	1 Kebijakan	0 Kebija kan	0%	1 Kebija kan	0 Kebija kan	0%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahunlalu 2023			Target program dan kegiata ntahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Progra m/ Kegiata n s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisas i(%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	30 reko menda si	30 reko menda si	33 reko menda si	100%	30 reko mendasi	11 reko mend asi	36.33%	30 reko men dasi	11 reko mend asi	36.67%
		2. Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PelaksanaanKebijakan dibidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orangyang mengikuti pelaksanaan KebijakanBidang PendaftaranOrmas, Evaluasi dan Mediasi SengketaOrmas, PengawasanOrmas dan Ormas Asing di Daerah	400 orang	2.625 orang	2.560 orang	97 %	4.200 orang	500 Orang	12%	4.200 orang	12%	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ SubKegiatan	Target kinerja capaian progra m (Renstr aPD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan sd Mei tahun 2024		Target Program / Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Targe t (2023)	Realisas i (2023)	Tingkat Realisas i (%)		Realisas i	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1 Kebijaka n	1 Kebij akan	1 Kebijaka n	100%	1 Kebija kan	1 Kebija kan	100%	1 Kebijaka n	1 Kebija kan	100%
		2. Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100%	100%	47%	47%	100%	0%	0%	100%	0%	0%
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang Ekonomi, sosial budaya, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	48%	48%	100%	48%	48%
		jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar		7 kelura han	7 kelurahan	100 %	15 Kelurahan	0	0%	15 Kelurahan		

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1000 orang	903 orang	860 orang	90 %	2.353 orang	1.018 orang	43.52%	2.353 orang	1.018 orang	100%
--	--	--	------------	-----------	-----------	------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	------

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan tahun berjalan (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Mei tahun 2024		Target Program/ Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100%	100 %	97 %	97 %	100%	14%	14%	100%	14%	14%
	Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	81%	80 %	-	-	81 %	-	-	81 %	-	-
	Persentase Potensi konflik yang terdeteksi	80%	80 %	61 %	81 %	80 %	51 %	51 %	80 %	51 %	51 %

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100 %	100 %	100 %	100%	6%	6%	100%	6%	6%
	2. Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi	33 konflik	18 konflik	23 konflik	26 konflik	34 konflik	12 konflik	35%	34 konflik	12 konflik	35%
	3. Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini	75%	75%	75%	100%	75%	57%	57%	75%	57%	57%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, /Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) tahun 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2023			Target progra mdan kegiat an tahun berjal an (2024)	Realisasi Kinerja Program/Kegi atan dan SubKegiatan sd Mei tahun 2024		Target Progra m/ Kegiata n s/d tahun berjala n (2024)	Perkiraan realisasi capaian target Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target (2023)	Realisasi (2023)	Tingk at Realis asi (%)		Realis asi	Ti ng ka t Re ali sa si (%)		Realisa si capaia n progra mdan Kegiata ns/d Tahun Berjala n	Ting kat capai an Realis asi Targ et Rens tra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Rumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantaun Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	6 dokumen	18 dokume n	18 Dokumen	100 %	44 dokumen	5 dokumen	11%	44 dokumen	5 dokumen	27.78 %

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.	287 orang	994 orang	950 orang	96 %	1.258 orang	256 orang	20.18 %	1.258 orang	256 orang	89.19 %
--	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-------------	-----------	---------	-------------	-----------	---------

Dari tabel realisasi pelaksanaan Rencana Kerja 2024 diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi pencapaian Program dan Kegiatan sampai Triwulan II 2024 secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi keuangan dan fisik masih belum sesuai dengan capaian target.
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target keuangan 62.83% sedangkan realisasi keuangan 54.77%. Perbedaan tidak terlalu signifikan dengan target sebesar 8.03% dikarenakan adanya mutasi pegawai.
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan target keuangan ditetapkan 28,90% sedangkan realisasi keuangan 25%. Perbedaan hanya 3.90 %, yang merupakan sisa anggaran dari belanja kegiatan.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik target keuangan 99.64% dan realisasi keuangan sebesar 84.61%, selisih 15.03 % dikarenakan hibah uang kepada Polresta belum terealisasi karena dalam proses verifikasi dokumen pencairan.
5. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, realisasi keuangan yang ditargetkan hingga triwulan II sebesar 81.26%, namun realisasi serapan anggaran masih sebesar 18.41%. Hal ini disebabkan hibah kepada organisasi masyarakat yang dibentuk peraturan perundang-undangan dan hibah kepada ormas yang terdaftar masih belum diberikan. Hingga saat ini masih tahap verifikasi kelengkapan dokumen.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, realisasi serapan anggaran yang ditargetkan hingga triwulan II sebesar 63.22%, sedangkan realisasinya hanya 25%. Hal ini disebabkan Hibah ormas yang akan diberikan masih tahap verifikasi kelengkapan dokumen.
7. Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial target keuangan ditetapkan 26,40% sedangkan realisasi keuangan 17.90%. Perbedaan hanya 8.5%, dikarenakan pencairan anggaran bertahap sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan.

Untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah khusus pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam, Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Untuk pencapaian target yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa hampir semua target sasaran bisa tercapai dengan maksimal. Keberhasilan pencapaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang baik, restukturisasi kelembagaan yang efisien, pemberdayaan sumber daya manusia yang efektif dan manajemen pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan peruntukannya. Untuk lebih terperinci dapat dilihat pada **Tabel 2.2** (Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II) sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

NO	Indikator	SPM / Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn (n-2)	Tahun (thn (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	TW II Tahun n	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Persentase Penurunan Konflik			12.5%	14,3%	16,79%	20%	15%	38,6%	73 %	16,79%	20%	
I	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Keseekretarian			95	95	95	95	95	95	95	95	95	
I.1	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	95%	75%	100%	100%	
II	Persentase Masyarakat yang terbina dalam wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila			95%	95%	95%	95%	100%	95%	67 %	95%	95%	
II.1	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan "yang Dilaksanakan".			100%	100%	100%	100%	100%	97%	100 %	100%	100%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn (n-2)	Tahun (thn (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	TW.II Tahun n	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Cakupan Peserta Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Jumlah Total Calon Peserta yang Seharusnya			100%	100%	100%	100%	90%	100%	50%	100%	100%	
III	a. Angka partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres			-	-	77 %	-	-	87 %	-	77 %	-	
	b. Angka partisipasi dalam pemilu Pilkada			-	-	77 %	-	-	-	-	77 %	-	
	c. Persentase masyarakat dan Partai Politik yang dibina			-	95 %	96 %	97 %	-	95%	-	96 %	97 %	
III.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang ditetapkan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	30 %	100%	100%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn (n-2)	Tahun (thn (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	TW.II Tahun n	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III.2	Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
IV.	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat			95%	95%	95%	95%	97%	95%	3 %	95%	95%	
IV.1	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan			1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	-	1 Kebijakan	1 Kebijakan	
V	Persentase Penanganan Konsolidasi Kerukunan Antar Agama			95%	96%	100%	100%	98%	95%	43 %	100%	100%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catat an Anali sis
				Tahun (thn (n-2)	Tahun (thn (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	TW.II Tahun n	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1 4
V.1	Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan			1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	
V.2	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif			100%	100%	100%	100%	100%	0%	-	100%	100%	
VI	a. Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini			75%	90%	90%	90%	65%	100%	-	90%	90%	
	b. Persentase potensi konflik yang terselesaikan			80%	80%	95%	95%	61%	94%	30 %	95%	95%	
	c. Persentase Implementasi Kebijakan antar Lembaga dalam rangka Peningkatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional			-	95%	95%	95%	-	95%	-	95%	95%	

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (thn (n- 2)	Tahun (thn (n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	TW.II Tahun n	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI.1	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan			100%	100%	100%	100%	100%	97%	14 %	100%	100%	
VI.2	Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan			—	80%	81%	83%	—	—	-	81%	83%	
VI.3	Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi			75%	80%	80%	80%	78%	100%	51%	80%	80%	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dari Renja 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran kehidupan masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keberagaman budaya, etnis, suku ras dan agama.
2. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis serta dalam suasana yang demokratis.
3. Terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi terjadinya berbagai peristiwa bencana.
4. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan aktual yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
5. Tersedianya SDM Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya.
6. Tersediannya SDM badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang profesional bersih dan berwibawa yang di dukung sikap mental dan prilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama.

Sasaran dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik;
4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
5. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila;
6. Optimalnya penanganan potensi konflik SARA.

3.2 PERUBAHAN BELANJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam untuk semester II T.A. 2024 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja 2024. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian anggaran belanja pada beberapa program dan kegiatan yaitu:.

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, terdapat pengurangan pagu sebesar **Rp. 5.333.455.885,-** sehingga pagu perubahan pada program tersebut menjadi **Rp. 4.713.557.885**. Pengurangan pagu disebabkan pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka adanya perubahan target jumlah Paskibraka dari 60 orang menjadi 40 orang.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dalam sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Dalam sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, pagu murni terdapat penambahan sebesar **Rp. 46.848.431.008** sehingga pagu perubahan menjadi **Rp. 47.184.998.894,-** Perubahan pagu tersebut disebabkan penambahan kegiatan Bimtek keuangan parpol.
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah. Pada program ini pagu murni **Rp. 23.854.602.200** sehingga pagu perubahan menjadi **Rp. 33.459.145.000.** , terdapat penambahan pagu hibah kepada instansi vertikal sebesar **Rp. 9.604.542.800,-**

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Pada program ini pagu murni Rp. **2.401.312.000**, terdapat penambahan sehingga pagu perubahan menjadi **Rp. 3.051.312.000**, terdapat penambahan pagu sebesar **Rp. 650.000.000** yang merupakan hibah uang kepada ormas.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya. Pada program ini pagu murni **Rp. 2.584.638.800**, terdapat penambahan pagu sebesar **Rp. 3.251.919.799,-** sehingga pagu perubahan menjadi **Rp. 667.280.999.** merupakan penambahan hibah uang kepada Lembaga dan Kegiatan P4GN.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini pagu murni Rp. **8.048.589.897**, terdapat penambahan pagu sebesar **Rp. 838.003.012,-** sehingga pagu perubahan menjadi **Rp. 8.886.592.909.** Penambahan pagu disebabkan perubahan jumlah pegawai dari 39 orang ke 41 orang dan adanya penambahan untuk belanja pengadaan peralatan dan mesin lainnya.

Untuk Pagu Perubahan Belanja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA. 2024 dapat dilihat pada **tabel 3.1** sebagai berikut :

TABEL 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024 SEBELUM DAN
SESUDAH PERUBAHAN

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAH AN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					125.240.870.397	100.547.526.487	
I	8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	10.285.389.520	8.886.592.909	
	8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	7.489.570.720	7.888.313.909	
	8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan	7.406.410.720	7.888.313.909	Terdapat ASN Mutasi dan Pensiun
	8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	83.160.000		
	8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 %	100 %	93.242.000		
	8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	38 Paket	27.398.000		
	8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	65.844.000		

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	673.405.000	429.683.000	
	8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	28.776.000	6.619.000	
	8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	130,297,000	133,720,000	
	8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20,968,000	20,968,000	
	8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	4,800,000	0	
	8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	488.564.000	268.376.000	
	8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	1.503.589.000	252.484.000	
	8	1	1	2.07	2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	-	829.772.000	-	
	8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	-	366.207.000	-	

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 unit	24 Unit	307.610.000	252.484.000	Perubahan sesuai kebutuhan OPD
	8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	300.452.800	222.942.000	
	8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	37.368.000	3.888.000	
	8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	263,084,800	219.054.000	
	8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Layak Fungsi	100 %	100 %	225.130.000	93.170.000	
	8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	39,780,000	39,780,000	

NO	URUSAN						PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya	5 Unit	3 Unit	113.020.000	50.020.000	Perubahan sesuai kebutuhan OPD
	8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.	54 Unit	5 Unit	72,330,000	3,370,000	
II	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100 %	100 %	5.563.576.882	4.713.557.885	
	8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase Peserta yang Bersertifikat Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	100 %	5.563.576.882	4.713.557.885	
									Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %			

NO	URUSAN						PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	60 Orang	40 orang	4.813.431.882	0	Perubahan sesuai kebutuhan OPD
	8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	300 Orang	617.080.000	467.080.000	
	8	1	2	2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	160 Keluarga	160 Keluarga	133.065.000	133.065.000	
	8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka	Pembentukan Paskibraka		Jumlah Paskibraka	-	40 orang	0	4.113.412.885	Perubahan sesuai kebutuhan OPD

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
III	8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politikdan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100 %	100 %	52.155.193.508	47.184.998.894	
								Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang Ditetapkan	100%	100%			
	8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman peserta peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politikdan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	100 %	52.155.193.508	47.184.998.894	

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
								Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	85 %	85 %			
								Persentase rumusan kebijakan bidang peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang diusulkan	100 %	100 %			
	8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum/Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	235 Orang	110 Orang	50.253.484.508	46.662.178.894	

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	37 Laporan	37 Laporan	1.901.709.000	522.820.000	Perubahan formula penghitungan laporan
IV	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	3.888.540.007	3.051.312.000	
	8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	3.888.540.007	3.051.312.000	

NO	URUSAN						PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
							RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
									Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %			
	8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4.200 Orang	500 Orang	3.888.540.007	3.051.312.000	Perubahan sesuai kebutuhan OPD
V	8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	4.016.166.000	3.251.919.799	
									Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif	100 %	100 %			
	8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersinar	15 Kelurahan	15 Kelurahan	4.016.166.000	3,251.919.799	

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
								Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ekonomi,Sosial,Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %			
	8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2.353 Orang	2.374 Orang	4.016.166.000	3.251.919.799	Perubahan sesuai kebutuhan OPD
VI	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terdeteksi	80 %	80 %	49.332.004.480	33.459.145.000	
								Persentase Rekomendasi FORKOPIMDA yang ditetapkan sebagai kebijakan	81 %	81 %			
								Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100 %	100 %			

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	34 konflik	23 konflik	49.332.004.480	33.459.145.000	
								Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan deteksi dini	75 %	75 %			
								Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	100 %			
	8	1	6	2.01	2		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	44 Dokumen	37 Dokumen	47.112.344.480	33.103.853.000	Pena mba han sub kegia tan hiba h verti kal

NO	URUSAN					PROGRAM /KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
						RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
	8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.258 orang	552 orang	2.219.660.000	355.292.000	Pengurangan kegiatan Forkopimda

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan Tahun 2021-2026 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun dengan menyelaraskan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Program dan kegiatan juga untuk mengakomodir misi dan visi Wali Kota Batam dalam mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Isu strategis Kota Batam di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu : Pada Tahun 2020 Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 64,22%. Untuk mencegah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2024, maka dalam program dan kegiatan tahun 2024 meningkatkan peserta kegiatan sosialisasi pemilih pemula dan sosialisasi kesadaran untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada.

Melalui penyelarasan program kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dan Visi dan Misi Wali Kota Batam, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam. Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk Penetapan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dapat dilihat Pada **tabel 3.2** dibawah ini :

TABEL 3.2																							
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																							
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM																							
TAHUN 2024																							
No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487					28.547.431.568,00				
	8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487					28.547.431.568,00				
	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487					28.547.431.568,00				
1	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	10.285.389.520,00	8.048.589.897,00	8.886.592.909						9.239.223.878,00			
	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	7.489.570.720,00	7.318.626.897,00	7.888.313.909			-	-	-	8.302.356.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.406.410.720,00	7.318.626.897,00	7.888.313.909	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-		8.226.691.662,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	83.160.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.664.483,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025										
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	-			100 %	100 %	93.242.000,00	0,00	0,00			-	-	-		66.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	38 Paket	27.398.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			27.170.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	65.844.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	673.405.000,00	387.681.000,00	429.683.000			-	-	ASN		370.177.847,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.776.000,00	6.619.000,00	6.619.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			14.307.573,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	130.297.000,00	133.720.000,00	133.720.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			162.219.658,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.968.000,00	20.968.000,00	20.968.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.710.108,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.331.614,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	488.564.000,00	221.574.000,00	268.376.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			164.608.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	1.503.589.000,00	0,00	252.484.000			-	-	ASN		167.970.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0	829.772.000,00	0,00	0	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	0	366.207.000,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			39.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	24 Unit	307.610.000,00	0,00	252.484.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			128.170.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	100 %	300.452.800,00	222.042.000,00	222.942.000			-	-	-		205.190.703,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.368.000,00	3.888.000,00	3.888.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263.084.800,00	218.154.000,00	219.054.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			187.690.703,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Layak Fungsi	-			100 %	100 %	225.130.000,00	120.240.000,00	93.170.000			-	-	ASN		127.358.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	3 Unit	113.020.000,00	77.090.000,00	50.020.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	5 Unit	72.330.000,00	3.370.000,00	3.370.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			43.058.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan				100 %	100 %	5.563.576.882,00	5.333.455.885,00	4.713.557.885							100.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang bersertifikat kegiatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Persentase rumusan kebijakan bidang penguatan ideologi dan karakter kebangsaan yang ditindaklanjuti	-			100 %	100 %	5.563.576.882,00	5.333.455.885,00	4.713.557.885			-	-	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				60 Orang	40 Orang	4.813.431.882,00	0,00	0,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				300 Orang	300 Orang	617.080.000,00	467.080.000,00	467.080.000,00	Kota Batam, Batam Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,				160 Keluarga	160 Keluarga	133.065.000,00	133.065.000,00	133.065.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				-	60 Orang	0,00	4.733.310.885,00	4.113.412.885	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik				100 %	100 %	52.155.193.508,00	46.848.431.008,00	47.184.998.894							8.875.959.053,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Persentase Peserta/Unit yang dimonev dan Menindaklanjuti Hasilnya Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang akan diusulkan	-			100 % 85 %	100 % 85 %	52.155.193.508,00	46.848.431.008,00	47.184.998.894			-	-	-		8.875.959.053,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					235 Orang	110 Orang	50.253.484.508,00	46.311.031.008,00	46.662.178.894,00	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			8.508.866.072,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				37 Laporan	37 Laporan	1.901.709.000,00	537.400.000,00	522.820.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			367.092.981,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang Ditetapkan/ dilaksanakan			1 kebijakan	1 kebijakan	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000							3.641.911.705,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan Persentase Peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		100 % 30 Rekomendasi	100 % 30 Rekomendasi	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000			-	-			3.641.911.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4200 Orang	500 Orang	3.888.540.007,00	2.401.312.000,00	3.051.312.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.641.911.705,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar aktif Jumlah Kebijakan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Ditetapkan				100 1 % Kebijakan	100 1 % Kebijakan	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799						4.155.729.038,00		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Satgas Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) Persentase Rekomendasi Persentase Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	-			100 % 15 kelurahan	100 % 15 kelurahan	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799			-	-		4.155.729.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2353 Orang	2.374 Orang	4.016.166.000,00	2.584.638.800,00	3.251.919.799	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.155.729.038,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang Ditetapkan Persentase Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Rekomendasi Forkopimda yang Ditetapkan sebagai Kebijakan				100 % 80 % 81 %	100 % 80 % 81 %	49.332.004.480,00	23.854.602.200,00	33.459.145.000						2.534.607.894,00		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Potensi Konflik yang Terdeteksi Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang Mampu Membantu Melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-			100 % 34 konflik 75 %	100 % 34 konflik 75 %	49.332.004.480,00	23.854.602.200,00	33.459.145.000			-	-	-		2.534.607.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				44 Dokumen	37 Dokumen	47.112.344.480,00	23.428.898.200,00	33.103.853.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.534.607.894,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1258 Orang	552 Orang	2.219.660.000,00	425.704.000,00	355.292.000	Kota Batam, Batam Kota, Belian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H											125.240.870.397,00	89.071.029.790,00	100.547.526.487							28.547.431.568,00		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 khususnya tahun 2024. Renja Perubahan ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu dan tahun berjalan, capaian Renstra perangkat daerah tahun lalu dan tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, rencana perubahan belanja perangkat daerah, dan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan selama periode tahun 2024.

Dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan, pada bab ini memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah :
 - a. Sesuai tugas pokok dan fungsi program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang nomenklatur nya banyak terkait tentang sosialisasi, dialog, rapat koordinasi baik kepada stakeholder Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar, Forum – forum FKUB, FPK, FKDM, PPWK, Pembauran, Partai Politik, Paguyuban, Ormas, dan Aparatur ASN Pemerintah Kota Batam, kiranya diperlukannya dukungan dari segi penganggaran sesuai target indikatif Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2024 yang mengacu pada kinerja RPJMD Kota Batam Tahun 2021–2026, Renstra OPD Tahun 2021– 2026, berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
 - b. Kondisi Geografis Kota Batam yang Heterogen, dengan keberagaman budaya, etnis, suku dan Agama, sangat di perlukan suatu kegiatan yang mendukung agar terciptanya kondusifitas di Kota Batam.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi :
 - a. Merencanakan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman terhadap RPJMD dan Renstra yang telah disusun dan mengacu kepada RKP memuat kebijakan program/kegiatan,
 - b. Mempedomani urusan yang telah diatur sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan urusan konkuren Pemerintah Daerah dan berdasarkan Perwako Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
2. Rencana tindak lanjut yang perlu diperhatikan perumusan program dan kegiatan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam tahun 2024 sudah mengacu pada target indikator kinerja RPJMD 2021–2026, Renstra OPD 2021–2026.

Akhirnya Rancangan Akhir Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja untuk periode tahun 2024. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, rencana kerja ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Batam, Juli 2024

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSADAN POLITIK
KOTA BATAM



RIAMA MANURUNG,SH.,M.H
NIP.19700515 199703 2 001